



## APBD DKI 2015

# Anggaran Prioritas Tak Berubah Pendidikan Salah Satu Yang Dipertahankan

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan alokasi terhadap program dan pos-pos prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak akan berubah. "Beberapa kegiatan yang tak perlu atau masih bisa ditunda sudah diubah," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati, kemarin.

Pemerintah DKI menggunakan APBD DKI tahun ini dengan APBD 2014 setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memutuskan penetapan APBD DKI 2015 menggunakan peraturan gubernur. Pemerintah kini tinggal menunggu koordinasi lanjutan dari Kementerian Dalam Negeri. "Saat ini mereka sedang evaluasi dan bahas lagi," ujar Tuty.

Menurut Tuty, ada beberapa peraturan yang menjadi rujukan dalam penentuan anggaran, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Pasal 106 Tahun 2006. Dalam peraturan itu, disebutkan pengeluaran setinggi-tingginya digunakan untuk keperluan yang diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. "Jika di Permendagri pelayanan dasar hanya ada pendidikan dan kesehatan."

Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS), menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono, tengah disusun kembali. Penentuan KUAPPAS, menurut Heru, disesuaikan dengan biaya pendapatan dan belanja

tahun lalu, yaitu Rp 64 triliun. Sedangkan KUAPPAS yang telah disusun untuk tahun ini sekitar Rp 73,09 triliun.

Adapun pengurangan anggaran, kata Heru, dilakukan terhadap pembelian tanah di Dinas Tata Air, Taman, Bina Marga, dan Dinas Perikanan. Masing-masing pengurangan anggaran bisa mencapai Rp 500 miliar dengan jumlah total sekitar Rp 2 triliun. Selain itu, dilakukan pengurangan belanja bangunan dan rumah bersejarah, termasuk lahan di lima wilayah sekitar Rp 500 miliar. Selain itu, pemangkasan selanjutnya diambil dari biaya kegiatan tak terduga sekitar Rp 1,4 triliun dan proyek pembuatan tanggul di Jakarta Utara turut dikurangi sekitar Rp 1,3 triliun berkurang menjadi Rp 1 triliun.

Selanjutnya, anggaran sekitar Rp 4,2 triliun juga akan dipangkas dari kegiatan belanja perjalanan dinas, hibah ke yayasan tidak terlalu penting, kegiatan pariwisata, sosialisasi dan kegiatan bantuan sosial, serta yang tidak perlu berjalan.